

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sebuah pendapatan atau penerimaan yang diperoleh di daerahnya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia Pendapatan Asli Daerah dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dimana penerimaan tersebut masuk pada khas daerah yang didapatkan melalui sumber-sumber daerah di wilayah tersebut, dipergunakan untuk keperluan daerah, serta dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Daerah untuk keperluan daerah. Oleh sebab itu, setiap daerah perlu meningkatkan upaya untuk dapat dipungut semaksimal mungkin dalam penerimaannya. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Isdijoso (2002) mengatakan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebuah perhitungan yang berasal oleh Pos Penerimaan Pajak yang berisikan hasil dari usaha milik daerah, Pos Pendapatan Investasi dan dikelola Sumber Daya

Alam. Setiap Pemerintah Daerah mencari atau mengusahakan penerimaan dengan mengacu ketentuan dalam mengatur sumber-sumber penggalan keuangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Nasution, 2003).

Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan jika penerimaan pemerintah pada umumnya dibutuhkan sebagai pembiayaan pemerintah yang dikeluarkan terdapat dua perbedaan yaitu penerimaan pajak dan bukan pajak. Pendapatan pemerintah di dapatkan dari pemerintah berupa pinjaman yaitu pinjaman pemerintah didalam Negeri serta pinjaman pemerintah yang berasal dari luar Negeri.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Landuyanto, 2005).

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada bab V (lima) No. 1 (satu) disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung serta digunakan dalam keperluan daerah bagi kemakmuran rakyatnya secara besar-besaran. Pajak Daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atas keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah pajak atas semua jenis penggunaan bahan bakar baik yang cair ataupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan merupakan pajak dari pengambilan dan atau air permukaan yang dimanfaatkan. Air permukaan merupakan seluruh air yang didapatkan oleh permukaan tanah, air laut bukan termasuk didalamnya, baik yang berada dilaut bahkan yang berada di darat.

(5) Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang tersedia dari hotel. Hotel merupakan jasa penginapan atau peristirahatan yang menyediakan fasilitas terhadap jasa terkait dalam pemungutan pembayaran, juga termasuk hotel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlahnya lebih banyak yaitu minimal 10 (sepuluh) kamar.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Pajak mineral bukan logam dan bantuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan permukaan bumi untuk dapat

dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah merupakan air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan tanah.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah atas pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan

dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta dengan bangunan di atasnya. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

3) Retribusi Daerah

Retribusi daerah muncul karena terdapat suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dari pemungut retribusi. Adanya retribusi daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah terdiri dari 3 golongan, yaitu:

a) Retribusi jasa umum, yakni retribusi oleh jasa yang telah tersedia bahkan akan diberikan oleh pemerintah daerah yang

bertujuan demi keperluan secara umum juga dapat dinikmati pada perorangan secara pribadi ataupun badan.

- b) Retribusi jasa usaha, yakni retribusi oleh jasa yang tersedia dari pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yang pada awalnya disediakan oleh sektor swasta.
 - c) Retribusi perizinan tertentu, yakni retribusi atau kegiatan tertentu pada pemerintah daerah pada rangka pemberian perizinan pada perorangan secara pribadi atau badan yang ditujukan sebagai pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
- 4) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan milik Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan daerah diperoleh hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah merupakan keseluruhan perusahaan yang dibangun oleh modal daerah baik secara keseluruhan maupun secara sebagian, yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan para pekerja dan mendorong suatu perekonomian daerah dimana suatu cara efisien untuk melayani masyarakatnya serta guna menghasilkan pemasukan daerah. Dalam Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 jenis penerimaan ini dapat dibagi menurut objek penerimaan yang mencakup:

- a) Bagian laba dalam penyertaan modal terhadap perusahaan milik daerah/BUMD
 - b) Bagian laba dalam penyertaan modal terhadap perusahaan milik negara/BUMN
 - c) Bagian laba dalam penyertaan modal terhadap perusahaan milik swasta maupun kelompok usaha masyarakat.
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah secara sah, yang disediakan guna menganggarkan dana pendapatan daerah yang tidak masuk pada berbagai pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan. Pendapatan ini juga merupakan salah satu pemerintah daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah beberapa hal, yaitu:

- a) Hak penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa/Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan maupun bentuk lain yang disebabkan oleh penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh Pemerintah Daerah.

2. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Kepariwisataan menurut Lunberg dan Krishnamoorthy (1997:4) kepariwisataan atau tourism merupakan cakupan wisatawan yang sedang melakukan wisata dari rumahnya serta perusahaan-perusahaan yang membantu mereka untuk memperlancar bahkan mempermudah perjalanan-perjalanan mereka yang membuatnya lebih menyenangkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan disebutkan jika pariwisata terdiri dari bermacam-macam usaha wisata serta didukung dengan banyaknya fasilitas dan pelayanan yang tersedia untuk masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah. Kepariwisataan merupakan seluruh usaha pada pariwisata yang sifatnya multidimensi dan multi disiplin yang muncul sebagai bentuk kebutuhan setiap perorangan maupun Negara yang berinteraksi antara wisatawan dalam masyarakat setempat, para wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah serta pengusaha. Dengan begitu pengertian pariwisata meliputi:

- 1) Semua kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan wisata
- 2) Pengusaha objek serta daya Tarik objek wisata seperti: kawasan wisata, taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan daerah atau yang bersifat alamiah (keindahan alam, gunung berapi, danau, dan pantai).

- 3) Pengusahaan jasa serta sarana pariwisata yakni: usaha jasa pariwisata biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, konsultan pariwisata, informasi pariwisata, usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan, bar, dan angkutan wisata.

Secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari secara berulang-ulang bahkan berkali-kali, sedangkan para wisata mempunyai arti perjalanan atau bepergian. Jadi, pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan dengan cara berulang-ulang (Musaneff, 1996). Menurut Wahab (1995) pariwisata merupakan suatu perjalanan wisatawan yang tidak ada keterkaitan dalam keperluan ataupun arti lain selain mengisi waktu luang untuk mengisi masa liburannya.

b. Jenis-jenis Pariwisata

Menurut Pendit (2002) pariwisata memiliki beberapa jenis, yaitu:

- 1) Wisata Budaya

Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan karena keinginan dengan tujuan memperbanyak pandangan hidup seseorang dalam melakukan kunjungan atau peninjauan ke suatu daerah lain bahkan ke luar negeri, mempelajari kondisi rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, hidup dengan berbudaya. Perjalanan tersebut dijadikan sebagai suatu pelajaran kegiatan budaya misalnya seni tari dan budaya yang ada didaerah tersebut.

2) Wisata Kesehatan

Wisata kesehatan merupakan suatu perjalanan para wisatawan dengan meninggalkan keadaan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan untuk beristirahat dalam arti jasmani dan rohani dengan cara mengunjungi tempat peristirahatan yang dapat menyembuhkan penyakit seperti mata air panas yang mengandung mineral, wisata yang mempunyai iklim udara yang dapat menyehatkan badan serta tempat-tempat yang dapat menyediakan fasilitas kesehatan lainnya.

3) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Pariwisata untuk menikmati perjalanan dilakukan untuk berlibur, mencari udara segar, memenuhi keingintahuan, mengendorkan ketegangan saraf, melihat sesuatu yang baru, menikmati keindahan alam, dan mendapatkan kedamaian.

4) Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*)

Pariwisata untuk olahraga dibagi menjadi dua kategori, yakni pariwisata olahraga besar seperti olimpiade, Asian games, dan SEA Games serta buat mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri, seperti mendaki gunung, panjat tebing, berkuda, berburu, *rafting*, dan memancing.

5) Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Pariwisata dalam kepentingan usaha berdagang dilakukan oleh sejumlah para pengusaha ataupun industrialis yang mencakup kunjungan ke pameran dan instalasi teknis.

6) Pariwisata untuk berkonvensi (*Convention Tourism*)

Pariwisata untuk berkonvensi berhubungan pada konferensi, simposium, sidang dan seminar internasional.

7) Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultural Tourism*)

Pariwisata untuk kebudayaan merupakan sebuah serangkaian motivasi untuk berkunjung ke monument bersejarah dan peninggalan zaman purbakala serta ikut dalam festival seni musik seperti keinginan belajar dipusat riset, mempelajari adat-istiadat.

8) Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*)

Pariwisata untuk rekreasi digunakan di waktu liburan untuk beristirahat, meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani serta menyegarkan keletihan.

c. Dampak Pariwisata

Pengembangan pariwisata hakikatnya bisa membawa kegunaan pada warga di daerah setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Soekadijo (2001), bahwa pariwisata mempunyai manfaat untuk masyarakat lokal, antara lain: pariwisata mungkin terdapat kontak antara perorangan pada bagian-bagian dunia yang paling jauh, dengan berbagai macam bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik, dan tingkat perekonomian. Pariwisata juga memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, menciptakan kesempatan bekerja sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan adalah suatu upaya padat karya dan membutuhkan tenaga

kerja yang tinggi dibandingkan dengan usaha yang lainnya. Manfaat lain dari pariwisata yaitu dapat menyumbang neraca pembayaran, karena wisatawan yang berbelanja dengan uangnya akan diterima di Negara yang dikunjungi. Oleh karena itu dapat meningkatkan pendapatan oleh wisatawan mancanegara tersebut merupakan faktor yang utama agar dapat menguntungkan neraca pembayaran yakni pendapatan yang lebih besar dari pada pengeluarannya.

Dampak positif secara langsung dapat didapatkan pemerintah daerah melalui pengembangan pariwisatanya yaitu seperti pajak daerah ataupun bukan pajak daerah. Sektor pariwisata menyumbangkan kontribusinya yang besar terhadap daerahnya melalui pajak daerah berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak rekalm, pajak minuman yang beralkohol dan pajak menggunakan air bawah tanah dan laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lainnya yang sah seperti pemberian hak atas tanah pemerintah.

Menurut Spillane (1987) bahwa pembelian para wisatawan di wilayah tempat wisatanya dapat menambah penerimaan serta pemerataan kepada masyarakat disekitarnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*). Dimana pada daerah pariwisata tersebut mampu meningkatkan penerimaannya melalui cara dengan menjual barang maupaun jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata, serta barang-barang souvenir.

Oleh karena itu, pariwisata harus dijadikan alternative untuk menarik laba yang banyak pada wilayah sekitarnya.

d. Peranan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau bergantung dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki. Untuk itu usaha guna mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Inovasi-inovasi baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan satu dari sumber penerima daerah yang diharapkan selalu mengalami peningkatan. Adapun keuntungan yang diberikan sektor pariwisata adalah sebagai berikut menurut Spillane (1987):

- 1) Membuka lapangan pekerjaan. Industri pariwisata adalah kegiatan mata rantai yang begitu panjang, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang banyak pada warga di wilayah tersebut.
- 2) Menambah penerimaan dan pemasukan, baik dalam pemerintah daerah ataupun masyarakat. Penerimaan ini dapat dilihat pada peningkatan penerimaan serta kegiatan usaha yang dilakukam oleh masyarakatnya, berupa penginapan, restoran, rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cideramata. Untuk

wilayah kegiatan usaha itu dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

- 3) Menambah devisa Negara
- 4) Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli
- 5) Menunjang gerak pembangunan daerah, di daerah pariwisata timbul pembangunan jalan, hotel, restoran, dan lain-lain sehingga pembangunan di daerah tersebut lebih maju.

Pariwisata bukan hanya dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan yang luas yaitu meliputi aspek sosial-budaya, politik dan hankamnas. Secara spesifik pengelola kepariwisataan diharapkan mampu memperbanyak penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan bekerja serta kesempatan untuk berusaha, dan mendorong dalam pembangunan daerah. Sektor ini juga diharapkan mampu menjadi penggerak dan pemicu untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Perkembangan pariwisata dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan berbagai permintaan, baik permintaan konsumsi maupun investasi yang ada akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa, baik konsumsi ataupun barang modal, sehingga nilai tambahnya dapat meningkat. Selama berkunjung ke tempat wisata, dengan pengeluaran belanjanya secara langsung wisatawan dapat menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya, *final demand* wisatawan secara

tidak langsung menyebabkan permintaan akan barang dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memenuhi permintaan para wisatawan diperlukan produksi serta investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, industri rumah makan dan restoran, agar pasar barang modal dan bahan baku dapat memperbesar dan meluas. Secara tidak langsung pariwisata dapat menciptakan efek konsumtif untuk rumah tangga. Kegiatan produksi yang diakibatkan oleh *tourism demand* dan *derived investment demand*, menciptakan kesempatan para pekerja produktif yang memberikan penerimaan kepada para pekerja dan rumah tangga, yang secara bergilir pekerja dan anggota rumah tangga penerima pendapatan akan membelanjakannya untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga dapat memperbesar mangsa pasar, yang dapat menyebabkan meningkatnya produksi dan pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan suatu daerah.

3. Hotel

Hotel merupakan suatu usaha jasa pelayanan yang rumit pengelolaannya, dengan menyediakan berbagai fasilitas yang bias dipergunakan oleh tamunya selama 24 jam (untuk bintang 4 dan 5). Usaha perhotelan bisa menunjang kegiatan para wisatawan dalam melakukan suatu perjalanan untuk mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata dan

membutuhkan tempat untuk menginap, makan dan minum serta tempat hiburan. (Sulistiyono, 1999 h, 12).

Adapun jenis-jenis hotel adalah sebagai berikut:

1. *City Hotel*

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang hanya tinggal sementara atau dalam jangka waktu pendek. City hotel juga disebut sebagai transit hotel karena biasanya ditempati oleh orang-orang yang melakukan kegiatan bisnis dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

2. *Residential Hotel*

Residential Hotel yaitu hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar dan jauh dari keramaian kota, tetapi mudah dalam mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini biasanya diperuntukkan oleh orang-orang yang ingin tinggal dalam jangka waktu yang lama.

3. *Resort Hotel*

Resort Hotel yaitu hotel yang berlokasi di daerah pegunungan atau tepi pantai, tepi danau, atau tepi aliran sungai. Hotel ini biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin beristirahat pada waktu libur atau bagi masyarakat yang ingin berekreasi.

4. *Motel (Motor Hotel)*

Motel yaitu hotel yang berlokasi di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya. Hotel ini diperuntukkan bagi masyarakat sebagai tempat istirahat sementara

dalam melakukan perjalanan yang dalam perjalanannya menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi.

Menurut (Tarmoezi, 2000) jumlah hotel dapat dibedakan menjadi:

a. Small Hotel

Kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.

b. Medium Hotel

Jumlah yang disediakan berjumlah antara 28-299 kamar.

c. Large Hotel

Jumlah kamar yang disediakan lebih dari 300 kamar.

5. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan umum, biaya angkutan menjadi beban angkutan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Selain itu, penggunaan jalan pun relatif dan m^2 /penumpangnya (Warpani, 1990:170).

Dalam perencanaan wilayah ataupun perencanaan kota, masalah transportasi kota tidak dapat diabaikan, karena memiliki peran yang penting, yaitu:

a. Melayani kepentingan mobilitas masyarakat

Peranan utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah (angkutan

perkotaan/perdesaan dan angkutan antar kotadalam provinsi dana antar provinsi).

b. Pengendalian lalu lintas

Dalam rangka pengendalian lalu lintas, peranan layanan angkutan umum tidak dapat ditiadakan. Dengan ciri khas yang dimilikinya, yakni lintasan tetap dan mampu mengangkut banyak orang seketika, maka efisiensi penggunaan jalan menjadi lebih tinggi karena pada saat yang sama luasan jalan yang sama dimanfaatkan oleh banyak orang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 36 menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

- a. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain
- b. Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- c. Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah perdesaan
- d. Angkutan lintas batas Negara yang merupakan angkutan orang yang melalau lintas batas Negara lain.

6. Objek Wisata

Objek wisata adalah suatu potensiyang dapat menyebabkan faktor penyebab pendorong kehadiran oleh wisatawan untuk datang ke suatu

tujuan tempat wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan maka objek wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara professional sehingga nantinya dapat menarik para wisatawan untuk berkunjung. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut (Mursid, 2003).

Objek wisata umumnya berdasarkan pada:

- a. Terdapat sumber daya yang mampu menimbulkan rasa senang dan nyaman
- b. Terdapat aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c. Terdapat ciri khusus yang bersifat langka/unik.
- d. Objek wisata alam memiliki daya Tarik tinggi karena keindahan alam yang dimiliki seperti pantai, pegunungan, hutan dan sebagainya.
- e. Objek wisata budaya memiliki daya tarik tinggi karena terdapat nilai khusus yang mampu memberikan pengetahuan mengenai budaya pada masing-masing daerah seperti upacara adat dan kesenian daerah.

7. Restoran dan Rumah Makan

Restoran dan rumah makan merupakan tempat yang dikunjungi orang untuk mencari berbagai makanan dan minuman juga merupakan suatu bangunan yang diorganisir secara komersial untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berupa makanan dan minuman. Restoran dan rumah makan dapat berlokasi di dalam suatu hotel, kantor atau pabrik, dan dapat juga berdiri diluar bangunan itu. Tujuan berdirinya sebuah restoran dan rumah makan adalah untuk berbisnis atau mencari keuntungan.

Menurut Mary B. Gregoire (2010), restoran dapat dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya:

a. *Limited Service, limited menu restaurant*

Limited service, limited menu restaurant merupakan restoran yang menyediakan menu makanan atau minuman secara terbatas kepada konsumen. Jenis restoran ini juga menargetkan konsumen yang menginginkan makan dengan cepat dengan harga yang terjangkau.

b. *Full-service restaurant*

Full-service restaurant merupakan restoran yang menyediakan meja untuk makan dengan pelayanan. Konsumen disapa dan *dipersilahkan* duduk oleh host dan melayani pemesanan makanan. Sedangkan pembayaran dilakukan setelah makan selesai.

c. *Casual dining restaurant*

Casual dining restaurant merupakan restoran yang disediakan untuk menarik konsumen dari ekonomi menengah yang menyukai makan *diluar* dan tidak menginginkan suasana yang formal dan harga yang mahal. Dalam jenis restoran ini terdapat suasana yang sederhana, santai, dan harga yang terjangkau.

d. *Fine dining restaurant*

Fine dining restaurant merupakan restoran yang di dekorasi dengan *suasana* elegan/mewah yang dapat memberikan pengalaman makan yang mengesahkan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil
Ni Komang Sri Wulandari, Sigit Triandaru (2014), Peran Sektor Pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 1990-2014	Independen: Sektor Pariwisata, Kunjungan Wisatawan, Jumlah Hotel, Belanja Modal, dan Sarana Angkutan Dependen: PAD	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, jumlah sarana angkutan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah hotel dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Ni Luh Gde Ana Pratiwi (2014), Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata dan PHR terhadap PAD Kabupaten Gianyar Tahun 1993-2013.	Independen : Jumlah Wisatawan, Retribusi Pendapatan Pajak, Jumlah Hotel, dan Jumlah Restoran Dependen : PAD	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, retribusi pendapatan pajak, jumlah hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Gianyar Tahun 1993-2013.
Qarina Novitri, Junaidi , M. Safri (2014), Determinan Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi	Independen: Tingkat Hunian Kamar Hotel, GDP Sektor Pariwisata, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Rata-rata lama tinggal, Jumlah Wisatawan. Dependen: Penerimaan Daerah	Regresi Linear Berganda	Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar hotel, GDP sektor pariwisata, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama tinggal, dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan lokal dari sektor pariwisata di Kabupaten Provinsi Jambi.

Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil
I Gede Sudjana Budhiasa, I Gusti Ngurah Ooka Amerta (2014), Pengaruh Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung Tahun 2001-2012.	Independen: Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Wisatawan Domestik, Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Dependen: PAD	Regresi Linear Sederhana	Hasil analisis menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara berpengaruh positif dan signifikan, kunjungan wisatawan domestik berpengaruh negatif dan signifikan, jumlah hotel dan akomodasi lainnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di kabupaten Badung Tahun 2001-2012.
Rani Ulhusna, Harlen, Taryono (2017), Pengaruh Sub Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi.	Independen: Jumlah Atraksi, Kunjungan, dan Tingkat Hunian Hotel Dependen: PAD	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Jumlah Atraksi, Kunjungan, dan Tingkat Hunian Hotel Berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.
Untung Bakti Nugroho (2017), Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata di Wilayah Karisidenan Surakarta Tahun 2011-2015	Independen: Jumlah Angkutan Umum dan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Dependen: Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Regresi Data Panel	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah wisatawan dan jumlah kamar hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel jumlah angkutan umum dan jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dalam penelitian ini menggunakan metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).
Sari (2016), Analisis Penerimaan Daerah	Independen: Jumlah Objek Wisata,	Regresi Data Panel	Penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki pengaruh positif dan

Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil
dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Belitung	Jumlah Wisatawan, Jumlah Kamar Hotel, dan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Dependen: Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata		signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung, karena nilai probabilitas yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan sebesar 0,05 (taraf nyata = 5%) yang berarti H ₀ diterima dan H ₁ ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif yang diterima dan signifikan antara variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, dan jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Belitung.
Fitri Rofy Nur Hayanti (2017), Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pariwisata di Kabupaten Magetan Tahun 2013;1-2016:12	Independen: Jumlah Wisatawan, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, dan Jumlah Rumah Sakit Dependen: Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata	Regresi Data Panel	Jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel dan jumlah rumah sakit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata, karena nilai probabilitas yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan sebesar 0,05 (taraf nyata = 5%) yang berarti H ₀ diterima dan H ₁ ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif yang diterima dan signifikan antara variabel Jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, jumlah kamar hotel dan jumlah rumah sakit terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten

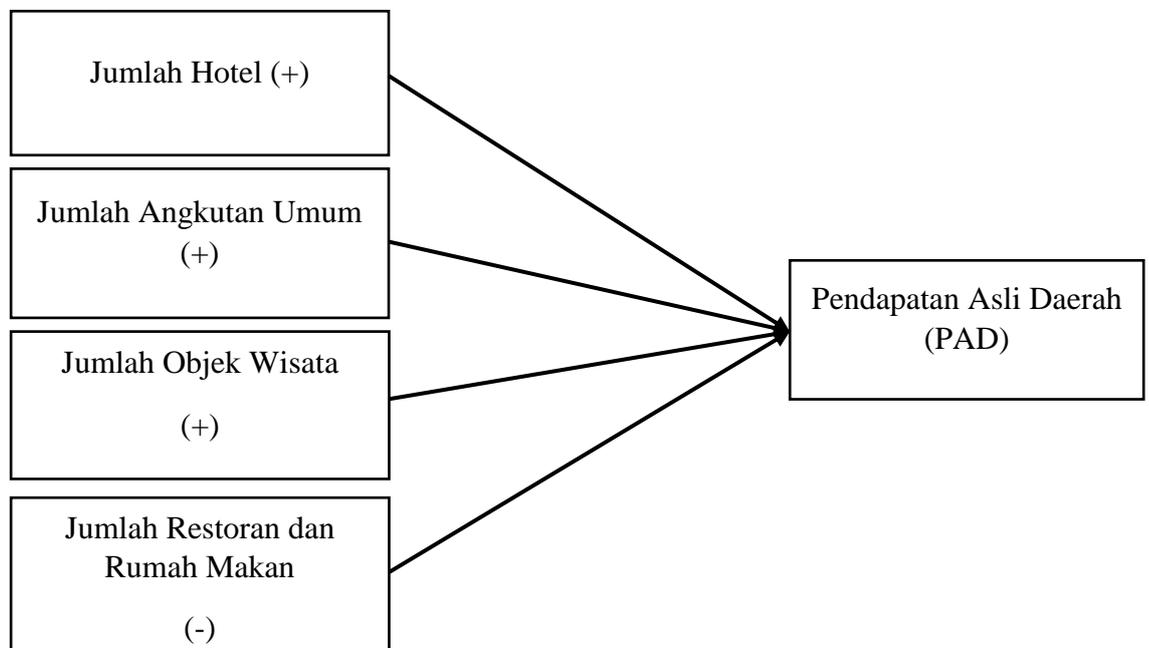
Nama	Variabel	Jenis Analisis	Hasil
			Magetan.
Mardianis, Hanibal Syartika (2018), Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci.	Independen: Sektor Pariwisata, Sektor Unggulan Dependen: PAD	Metode Location Quotient, Dynamic Location Quotient, dan Indeks Spesialisasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Kerinci.
Yeni Ratnawati, (2016), Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur	Independen: Pajak Hotel, Restoran Tempat Hiburan, dan Retribusi Dependen: PAD	Regresi Data Panel	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan retribusi objek-objek wisata memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan hasil hubungan yang tidak cukup signifikan.

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Jumlah Hotel diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Yogyakarta.
2. Variabel Jumlah Angkutan Umum diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Yogyakarta.
3. Variabel Jumlah Objek Wisata diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Yogyakarta.
4. Variabel Jumlah Restoran dan Rumah Makan diduga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Yogyakarta.

D. Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian